

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ditemukan hasil bahwasanya kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel pada tahun 2019 bukanlah sebuah pilihan rasional (*rational choice*) yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia pada saat itu. Karena berdasarkan konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Rational Actor Model* dari Graham T. Allison ditemukan bahwa dari beberapa alternatif kebijakan nikel yang ada, kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel merupakan sebuah kebijakan yang memiliki konsekuensi tinggi, karena berdasarkan implikasi yang ditimbulkannya terhadap aspek politik, lingkungan dan ekonomi Indonesia kebijakan tersebut lebih banyak menghasilkan *cost* daripada *benefit*-nya.

Sedangkan, kebijakan yang paling rasional yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia pada saat itu adalah dengan menerapkan kebijakan menaikkan pajak ekspor bijih nikel. Karena alternatif kebijakan ini selain dapat membantu Indonesia dalam meraih *goal* dan *objective*-nya, ternyata kebijakan ini juga memiliki konsekuensi yang rendah yang disebabkan oleh banyaknya jumlah *benefit* yang dihasilkan ketimbang *cost*-nya. Kendatipun demikian, pemerintah Indonesia tetap memilih untuk memberlakukan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel ketimbang kebijakan menaikkan pajak ekspor bijih nikel. Hal tersebut tidak terlepas dari begitu besarnya pengaruh investor atau MNC asal Tiongkok terhadap kebijakan tersebut.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan. Pertama, perlunya studi lanjutan terkait dengan analisis biaya dan manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel tersebut. Karena berdasarkan pantauan penulis masih minimnya studi yang membahas mengenai hal tersebut. Saran yang penulis berikan tersebut sejalan dengan rekomendasi yang diberikan oleh *International Monetary Fund* (IMF) pada tahun 2023 yang menyebutkan bahwa kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel yang diterapkan oleh Indonesia tidak berdasarkan analisis biaya dan manfaat. Oleh karena itu, studi mengenai hal tersebut sangat perlu dilakukan untuk mengetahui sudah sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat terhadap Indonesia. Kedua, perlunya studi lanjutan yang membahas mengenai pengaruh atau lobi dari MNC asal Tiongkok terhadap berlakunya kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel di Indonesia. Karena, berdasarkan pantauan penulis masih minimnya studi yang membahas hal tersebut.

